

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai Thailand, tentu saja kita akan mengenal negara ini sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Hal tersebut diperkuat oleh Marshall Cavendish dalam *Encyclopedia of World Geography Southeast Asia* (2002:289), bahwa Thailand merupakan suatu kerajaan yang merdeka selama berabad-abad dan salah satu wilayah yang tak pernah mengenal pemerintahan kolonial. Pernyataan tersebut tak bisa terpisahkan dari sejarah panjang negara ini. Ketika kolonialisme negara-negara Eropa telah mengepung wilayah Asia Tenggara pada abad ke-20, uniknya Thailand masih berstatus sebagai negara yang merdeka. Inggris dan Perancis adalah negara-negara Eropa yang memiliki kekuasaan besar di Asia Tenggara. Inggris yang telah menduduki Burma dan Malaya, dan Perancis yang juga berhasil menguasai Indocina (Kamboja, Laos, Vietnam), menjadikan Thailand sebagai *Buffer State* (wilayah pemisah kekuasaan). Hal ini disebabkan karena kedua negara tersebut tidak ingin terjadi bentrokan karena wilayah Thailand yang berada di antara wilayah koloni mereka. Hal ini diperkuat oleh Jan Romein dalam bukunya yang berjudul *The Asia Century: A History of Modern Nationalism in Asia* (1962:77), menyatakan bahwa Inggris dan Perancis setuju untuk menyelesaikan apa yang

mereka sebut “*Siamese Question*” (“Masalah Siam/Thailand”), keduanya menjamin kemerdekaan Thailand dan dijadikan *Buffer State* antara Malaya dan Burma dan Indocina Perancis.

Status kemerdekaan Thailand ini dipertahankan sampai tahun 1930-an ketika Thailand menyatakan dirinya sebagai negara yang netral. Namun kebijakan politik Thailand berubah seiring dengan munculnya kekuatan militer yang menguasai Thailand pada tahun 1938, dimana terpilihnya seorang jendral militer yang bernama Plaek Phibun Songkhram. Dia adalah salah seorang pemimpin Partai Rakyat Thailand yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan raja dalam Revolusi Thailand 1932. Dengan kekuatan militernya, Perdana Menteri Plaek Phibun Songkhram (atau PM Phibun) melakukan perubahan dalam kehidupan politik Thailand dimana munculnya sifat nasionalisme dan Chauvinisme ala Jerman.

Pernyataan di atas didukung oleh pendapat Hall dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Asia Tenggara* (1988:757), ia berpendapat bahwa manifestasi lain yang menarik chauvinisme baru itu adalah perubahan nama resmi bagi negeri Siam menjadi Thailand bulan Juni 1939. Orang-orang Siam selalu lebih menyenangi dan bangga negerinya disebut Muang Thai, “Negeri Kebebasan”, dan sekarang dinyatakan bahwa orang asing juga harus menggunakan nama ini. PM Phibun juga memulai sesuatu kampanye untuk memerhitungkan cara-cara dan praktik-praktik sosial Barat, dan serangkaian surat selebaran dikeluarkan untuk menjelaskan politik pemerintah dalam hubungan ini.

Pernyataan Hall tersebut juga didukung oleh pendapat Donald E. Nuechterlein dalam bukunya yang berjudul *Thailand and the Struggle for Southeast Asia* (1967:69), bahwa ketika faksi militer yang dipimpin oleh Phibun Songkhram berkuasa pada bulan Desember 1938, terdapat pergeseran politik di dalam negeri maupun luar negeri. Angkatan Bersenjata Thailand berkembang pesat, orang Tionghoa setempat ditempatkan di bawah pembatasan berat, pemerintah konstitusional kehilangan banyak validitas, perusahaan bisnis asing semakin dilecehkan, dan beberapa dipaksa keluar dari bisnis, dan pemerintah menerapkan program nasionalisme chauvinis yang kuat mirip kebijakan di Jerman dan Jepang.

Penulis bisa menyimpulkan bahwa dengan kekuatan militernya yang besar PM Phibun membangun kesadaran Thailand akan nasionalisme dan chauvinisme. Hal ini ditandai dengan perubahan nama Siam menjadi Muang Thai/ Thailand yang memiliki arti “Negeri Kebebasan” pada tahun 1939. Tentunya perubahan nama ini memiliki tujuan tersendiri. PM Phibun melakukan ini dikarenakan untuk mendapatkan kembali beberapa wilayahnya di Laos dan Kamboja yang telah direbut oleh Perancis pada tahun 1893 dan 1904 serta wilayah di Semenanjung Malaya dari Inggris pada tahun 1904.

Pada tanggal 12 Juni 1940, pada saat berlangsungnya Perang Dunia II, Thailand menyatakan netralitasnya dengan menegosiasikan pakta nonagresi dengan Jepang, Inggris dan Perancis. Hal ini disebabkan karena Thailand tidak ingin terlibat perang sehingga kemerdekaannya tidak terganggu. Namun pada saat

itu juga kekuatan Perancis di Asia Tenggara melemah karena Perancis baru saja dikalahkan oleh Jerman, sehingga menjadi peluang bagi Thailand untuk bisa merebut kembali wilayahnya di Kamboja dan Laos dari Perancis.

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Rong Syamanda dalam *History of Thailand* (1976:172). Bahwa pada pecahnya perang di Eropa pada tanggal 3 September 1939 Thailand menyatakan kenetralannya sehingga menjadi sesuai dengan keinginan rakyatnya. Namun kecemasan besar dalam negeri bahwa cepat atau lambat Jepang akan bergabung dengan kekuatan Axis, Hitler Jerman, dan Mussolini Italia, yang akan membawa perang ke depan pintu Thailand. Kepercayaan ini kemudian dikuatkan oleh pembentukan Axis Roma-Berlin-Tokyo. Dalam rangka menjaga dirinya sendiri terhadap resiko kemungkinan agresi dari luar, Thailand dan Jepang merumuskan perjanjian, dimana mereka akan mengembangkan aliansi dan menghormati satu sama lain integritas teritorial. Dan pada tanggal 12 Juni 1940 Thailand menandatangani pakta non-agresi dengan Inggris dan Perancis.

Pendapat Syamanda juga didukung oleh literatur yang ditulis oleh Patit Paban Mishra dalam bukunya yang berjudul *The History of Thailand* (2010:112-113) yang mengemukakan bahwa Pibun menyetujui persetujuan non-agresi dengan Perancis dan Inggris pada tanggal 12 Juni 1940. Pada hari yang sama juga, dia juga menyetujui kerjasama dengan Jepang.

Penulis melihat bahwa kebijakan politik luar negeri PM Pibun yang paling besar adalah untuk mendapatkan kembali wilayah Thailand di Indocina

yang dianeksasi oleh Perancis. Namun untuk mendapatkan kembali wilayah tersebut PM Phibun memerlukan kekuatan asing yang memiliki bantuan militer yang cukup besar. Jepang sebagai negara Asia yang tengah dalam kemenangan pada awal Perang Dunia II dilihat oleh PM Phibun sebagai kekuatan yang mampu untuk membantu Thailand dalam merebut kembali wilayah-wilayah tersebut. Untuk itu Thailand pada bulan Oktober 1940 menyatakan perang kepada Perancis, setelah mendapatkan bantuan militer dari Jepang. Perang antara Perancis dan Thailand pecah dan akhirnya pada bulan Mei 1941 Perancis setuju untuk mengembalikan wilayah Laos dan Kamboja yg direbutnya tahun 1893 dan 1907 kepada Thailand. Akhirnya pada tanggal 21 Desember 1941 Thailand secara resmi beraliansi dengan Jepang.

Namun harga mahal harus ditelan pemerintahan PM Phibun khususnya dan rakyat Thailand umumnya, dimana atas kebijakan aliansi ini Thailand harus rela untuk mengizinkan wilayahnya sebagai tempat transit pasukan dan pasokan militer Jepang di Asia Tenggara. Jepang yang tengah berada dalam Perang Dunia II, ingin memperluas kekuasaannya di Asia Tenggara dalam rangka ingin menguasai kekuatan Inggris di Malaysia dan Burma (Myanmar). Thailand dijadikan pusat militer Jepang di Asia Tenggara karena letak Thailand yang berbatasan langsung dengan kedua wilayah tersebut, sehingga memudahkan Jepang untuk menginvasi Malaysia dan Burma. Akibat dari kebijakan politik tersebut pula Thailand secara terpaksa masuk kedalam kancah Perang Dunia II,

dimana Thailand akan membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu, yakni Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis.

Dari pemaparan di atas, maka bisa dikatakan terdapat perubahan kondisi dan kebijakan politik luar negeri Thailand pada masa pemerintahan PM Phibun. Dimana sebelum diperintah oleh PM Phibun, Thailand merupakan negara merdeka dan netral, namun mengapa saat PM Phibun berkuasa Thailand menjadi negara yang ikut berperan dalam Perang Dunia II. Bahkan Thailand secara tidak langsung Thailand diduduki Jepang. Sehingga inilah ketertarikan penulis ingin mengkaji hal tersebut, dan mengangkatnya kedalam sebuah penelitian ilmiah berbentuk skripsi, dengan permasalahan utama yaitu "*Mengapa Kebijakan Politik Luar Negeri Thailand Berubah ketika Dipimpin oleh Perdana Menteri Plaek Phibun Songkhram Tahun 1938-1944*" sebagai suatu kajian sejarah yang berjudul **KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PERDANA MENTERI PLAEK PHIBUN SONGKHRAM DI THAILAND TAHUN 1938-1944.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan pokoknya adalah "Mengapa Kebijakan Politik Luar Negeri Thailand Berubah ketika Dipimpin oleh Perdana Menteri Plaek Phibun Songkhram Tahun 1938-1944". Adapun untuk membatasi kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa

pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kondisi Sosial-Politik Thailand sebelum Phibun menjadi Perdana Menteri Thailand tahun 1932-1938?
2. Mengapa PM Phibun memilih untuk bekerjasama dengan Jepang dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya tahun 1938-1944?
3. Kebijakan politik luar negeri apa saja yang dikeluarkan PM Phibun di Thailand pada tahun 1938-1944?
4. Bagaimanakah dampak kebijakan politik luar negeri PM Phibun terhadap kehidupan Politik, Ekonomi, dan Sosial-Budaya masyarakat Thailand tahun 1938-1944?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan kondisi Sosial-Politik Thailand sebelum Phibun menjadi Perdana Menteri Thailand tahun 1932-1938.
2. Menjelaskan sebab PM Phibun memilih untuk bekerjasama dengan Jepang dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya tahun 1938-1944.
3. Menjelaskan kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan PM Phibun di Thailand pada tahun 1938-1944.

4. Mendeskripsikan dampak kebijakan politik luar negeri PM Phibun terhadap kehidupan Politik, Ekonomi, dan Sosial-Budaya masyarakat Thailand tahun 1938-1944.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan mengkaji pembahasan mengenai “KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PERDANA MENTERI PLAEK PHIBUN SONGKHRAM DI THAILAND TAHUN 1938-1944” terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis, diantaranya :

1. Memperkaya penulisan sejarah kawasan, khususnya Sejarah Asia Tenggara dan Sejarah Kebangkitan Bangsa-bangsa Asia bagi jurusan pendidikan Sejarah FIPS UPI Bandung.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian sejarah mengenai kehidupan dan kebijakan politik di Thailand, khususnya disaat pemerintahan PM Phibun tahun 1938-1944 .

1.5. Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsuddin, 2007: 13). Untuk mengkaji pembahasan ini, penulis

menggunakan beberapa metode penelitian Sejarah yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran rekonstruksi imajinatif mengenai peristiwa Sejarah pada masa lampau secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah (Ismaun, 2005:34).

Terdapat enam langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah yaitu:

1. Memilih judul atau topik yang sesuai;
2. Mengusust semua eviden (bukti) yang relevan dengan topik;
3. Membuat catatan yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung;
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah berhasil dikumpulkan (kritik sumber);
5. Menyusun hasil penelitian ke dalam pola yang benar atau sistematika tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya;
6. Menyajikan dan mengkomunikasikan kepada pembaca dalam suatu cara yang menarik perhatian sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin (Sjamsuddin ,2007: 89).

Sjamsuddin (2007: 86-170) mengungkapkan bahwa terdapat empat tahap metode sejarah yakni sebagai berikut:

- 1) *Heuristik*, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam proses mencari sumber-sumber ini, penulis mendatangi berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), perpustakaan Museum Konferensi Asia-Afrika (MKAA), Perustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), dan Perpustakaan TNI AD. Selain itu penulis pun mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti membeli buku-buku di Gramedia, Rumah buku dan Palasari.

- 2) *Kritik*, Pada langkah ini penulis berupaya melakukan penilaian dan mengkritisi sumber-sumber yang telah ditemukan baik dari buku, artikel, *Browsing internet*, sumber tertulis, arsip dan hasil dari penelitian serta sumber lainnya yang relevan. Sumber-sumber yang diperoleh akan dipilih melalui tahap kritik eksternal yaitu cara pengujian kebenaran sumber sejarah dari aspek-aspek luar sumber tersebut yang digunakan. Kemudian menggunakan kritik internal yaitu pengujian kebenaran yang dilakukan terhadap isi dari sumber sejarah tersebut. Pada langkah ini peneliti harus bisa menyaring informasi ataupun data yang diperoleh guna mendapatkan hasil penelitian yang baik, relevan dan valid.
- 3) *Interpretasi*, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain. Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan proposal ini.
- 4) *Historiografi*, merupakan langkah terakhir dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya dengan cara menyusunnya ke dalam suatu tulisan yang jelas

dengan bahasa yang sederhana dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar.

1.5.2. Teknik Penelitian

Dalam mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk bahan kajian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik studi literatur. Studi literatur digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang dikaji, baik literatur lokal maupun asing yang semua itu dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Sumber yang dapat dikumpulkan penulis hanya sumber tertulis yang merupakan sumber sekunder.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini tersusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya berisi penjelasan mengapa masalah tersebut diteliti dan penting untuk diteliti, serta mengenai alasan pemilihan masalah tersebut sebagai judul. Pada bab ini juga berisi perumusan dan pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan tentang materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Penjelasan materi-materi tersebut adalah berupa informasi-informasi yang diperoleh dari hasil kajian pustaka. Dari hasil kajian pustaka ini dipaparkan beberapa konsep. Konsep-konsep yang dikembangkan dalam bab ini adalah konsep-konsep yang relevan dengan bahan penulisan yang dilakukan.

Bab III Metode dan Teknik Penelitian, bab ini membahas langkah-langkah metode dan teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisannya. Metode yang digunakan terutama adalah metode historis. Penelitian historis (*historical research*) adalah suatu usaha untuk menggali fakta-fakta, dan menyusun kesimpulan dari peristiwa-peristiwa masa lampau. Didukung oleh langkah-langkah penelitian yang mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penelitian sejarah.

Bab IV Pembahasan. Di dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai hasil penulisan dan pembahasan yang berisi mengenai seluruh informasi dan data-data yang diperoleh penulis melalui penulisan yang telah dilakukan. Pemaparan dalam bab ini berupa hasil penulisan yang diuraikan dalam bentuk uraian deskriptif yang bertujuan agar semua keterangan yang diperoleh dalam bab hasil penulisan dan pembahasan ini dapat dijelaskan secara rinci. Dalam bab ini juga ditemukan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Bab V Kesimpulan, pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban serta analisis penulis terhadap masalah-masalah secara keseluruhan yang merupakan hasil dari penelitian. Hasil akhir ini merupakan hasil penelitian serta interpretasi penulis mengenai inti dari pembahasan. Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang didapatkan setelah mengkaji permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

